

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berlandaskan pada hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, mampu dibagikan simpulan:

1. Rata lama sekolah melalui jangka pendek menampilkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia, dan melalui jangka panjang menampilkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Hal ini memprediksi bahwa peningkatan durasi pendidikan masyarakat selama periode penelitian belum menjadi faktor dominan yang mampu menekan angka kriminalitas secara nyata, kemungkinan dikarenakan adanya fenomena pengangguran terdidik atau ketidaksesuaian antara keterampilan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Jumlah angkatan kerja melalui jangka pendek menampilkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia, dan melalui jangka panjang menampilkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekadar peningkatan kuantitas penduduk usia produktif yang masuk ke pasar kerja tidak serta-merta mengurangi kejahatan jika tidak diimbangi dengan kualitas pekerjaan yang layak dan upah yang memadai, sehingga tekanan ekonomi masih dirasakan oleh sebagian angkatan kerja.
3. Produk domestik bruto per kapita melalui jangka pendek menampilkan pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia, dan melalui jangka panjang menampilkan pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Temuan ini menunjukkan adanya anomali teori (*target effect*), di mana peningkatan pendapatan rata-rata justru meningkatkan peluang kejahatan karena semakin banyaknya aset berharga yang beredar di masyarakat atau akibat adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang memicu kecemburuan sosial.
4. Penanaman modal dalam negeri melalui jangka pendek menampilkan

pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia, dan melalui jangka panjang menampilkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Hal ini menyiratkan bahwa realisasi investasi domestik belum sepenuhnya efektif dalam mereduksi kriminalitas, kemungkinan karena investasi yang masuk lebih bersifat padat modal (*capital intensive*) sehingga penyerapan tenaga kerja lokal kurang optimal dalam mengurangi tekanan sosial-ekonomi.

5.2. Saran

1. Pemerintah disarankan untuk tidak berfokus pada kuantitas angka partisipasi sekolah, melainkan pada kualitas dan relevansi pendidikan. Selain itu tidak hanya mengejar target wajib belajar 12 tahun, tetapi merevitalisasi kurikulum vokasi dan kejuruan agar lulusan memiliki skill spesifik yang langsung terserap industri.
2. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung sektor-sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penduduk usia produktif tidak hanya berstatus "bekerja", tetapi memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tekanan ekonomi pemicu kriminalitas dapat diminimalisir.
3. Pemerintah disarankan untuk menggeser fokus dari sekadar pertumbuhan ekonomi (*growth*) menuju pemerataan ekonomi (*equity*). Kebijakan fiskal yang pro-pemerataan, seperti optimalisasi pajak progresif dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran kepada kelompok rentan, sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan sosial (gini ratio) yang sering kali menjadi pemicu kecemburuan sosial.
4. Pemerintah disarankan untuk memprioritaskan dan memberikan kemudahan bagi investasi domestik yang bersifat padat karya (*labor intensive*) dibandingkan padat modal (*capital intensive*). Dengan mendorong investasi yang menyerap banyak tenaga kerja lokal, dampak ekonomi dari PMDN akan lebih merata dirasakan oleh masyarakat, yang pada gilirannya akan efektif dalam mengurangi pengangguran dan potensi kriminalitas di daerah tujuan investasi.